

## **PENGARUH ALIANSI AUKUS TERHADAP DINAMIKA KEAMANAN UNI EROPA 2021-2024**

**Bagoes Arief Darmawan<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

Australia, the United Kingdom, and the United States have formed an international security agreement summarized in the AUKUS Pact. The pact covers cooperation in artificial intelligence, cyber, quantum, underwater systems, and long-range strike capabilities, which will take place over the next 18 months. The purpose of this agreement is to counterbalance China's military power, which is considered to be expanding and potentially threatening the Indo-Pacific region. Looking at the contents of the agreement, it appears that Australia has the potential to build nuclear-powered submarines with the help of technology from the United Kingdom and the United States. This has caused unrest in the Indo-Pacific region due to concerns that the region will experience a security dilemma in terms of military power. China has not remained silent and has criticized the implementation of the AUKUS pact, saying it could disrupt regional stability. In conducting identification and analysis, this study applies a neo-realist approach and the concept of national interest. Through qualitative research methods, this study shows that the United States has not yet been able to escape its Cold War mentality. The United States has a vested interest in preventing China from increasing its military strength due to competition between the two countries in both the economic and technological sectors.

**Keywords:** AUKUS, Regional Stability, China, Australia

### **ABSTRAK**

Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat membentuk perjanjian keamanan internasional yang dirangkum dalam Pakta AUKUS. Pakta tersebut meliputi kerja sama teknologi kecerdasan buatan, siber, kuantum, sistem bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh yang akan berlangsung 18 bulan ke depan. Tujuan dibuatnya kesepakatan ini untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok yang dinilai semakin meluas dan berpotensi membahayakan wilayah Indo-Pasifik. Bila diperhatikan isi kesepakatan tersebut, terlihat bahwa adanya potensi Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi dari Britania Raya dan Amerika Serikat. Kegaduhan terjadi di kawasan Indo-Pasifik karena dikhawatirkan akan mengalami *security dilemma* dari segi kekuatan militer. Tiongkok pun tidak tinggal diam dan mengkritisi pemberlakuan Pakta AUKUS dapat mengganggu stabilitas regional. Dalam melakukan identifikasi dan analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan neo-realisme, konsep kepentingan nasional. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih belum bisa terlepas dari trauma mereka terhadap mentalitas Perang Dingin. Adanya kepentingan pribadi Amerika Serikat dalam mencegah peningkatan kekuatan militer Tiongkok dari persaingan kedua negara ini baik dari sektor ekonomi maupun teknologi.

**Kata Kunci:** AUKUS, Keamanan, Stabilitas Regional, Tiongkok, AS, Australia

## PENDAHULUAN

Strategi memiliki banyak definisi dengan perbedaan yang signifikan satu sama lain. Carl von Clausewitz mendefinisikan strategi sebagai berikut: *“Strategy (is) the use of engagements for the object of war”* (strategi adalah penggunaan dalam pertempuran untuk keperluan peperangan). Definisi “strategi” menurut Carl von Clausewitz berfokus pada ranah kekuasaan militer yang merujuk pada peperangan. Kesimpulan tersebut diambil dengan merujuk “keahlian militer” pada masa Yunani Kuno. Berbeda halnya dengan Clausewitz yang memfokuskan definisi strategi dalam ranah militer, Gregory D Foster berpendapat bahwa: *“Strategy is ultimately about effectively exercising power”* (strategi tak lain tentang cara penggunaan power secara efektif). Power yang dimaksud oleh Foster tidak hanya berkaitan dengan militer, melainkan juga membahas penggunaan sumber daya, ideologi, hingga kebudayaan agar dapat mendapat hasil yang maksimal. Tidak berbeda jauh dengan pendapat Foster, Robert Osgood juga menyampaikan aspirasinya mengenai definisi strategi: *“Strategy must now be understood as nothing less the overall plan for utilizing the capacity for armed coercion in conjunction with economic, diplomatic, and psychological instruments of power to support foreign policy most effectively by overt, covert and tacit means”* (strategi dewasa ini harus dipahami tidak kurang dari keseluruhan rencana untuk memanfaatkan kekerasan bersenjata, namun juga berhubungan dengan perekonomian, diplomasi, dan instrumen psikologis dari power untuk mendukung politik luar negeri dengan maksud terbuka, tersembunyi, maupun diam-diam). Osgood menegaskan keberadaan ekonomi, diplomasi, dan instrumen power lainnya dalam mendukung politik luar negeri juga tidak kalah penting dari kekuatan militer terutama di era globalisasi ini.

Selain ketiga tokoh tersebut, Murray dan Grimslay berpendapat bahwa: *“Strategy is a process, a constant adaptation to the shifting conditions and circumstances in a world where chance, uncertainty, and ambiguity dominate”* (strategi adalah proses, terus beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan keadaan di dunia yang mana perubahan, ketidakpastian, dan ambiguitas mendominasi). Berbeda dengan ketiga tokoh sebelumnya yang mendefinisikan strategi yang berkaitan dengan militer ataupun cara mempengaruhi pihak lain, Murray dan Grimslay justru menyimpulkan bahwa definisi tidak lain adalah proses beradaptasi akan perubahan yang terjadi di dunia.

Bila menelisik dari beragam pendapat para pakar di atas, definisi strategi selalu berubah sudut pandang seiring dengan berkembangnya zaman. Awalnya mereka yang menganggap strategi hanya berfokus untuk mencegah dan menanggulangi isu “politik tingkat tinggi” (*high politics*) yang menyangkut isu politik, keamanan, dan strategis, hingga akhirnya isu yang dibahas meluas pada isu “politik tingkat bawah” (*low politics*) yang meliputi isu diplomasi, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Walau terdapat dua perbedaan dalam menyikapi isu yang dibahas, pada dasarnya semua dilakukan untuk kepentingan politik *“the*

*theory and practice of the use, and threat of use, of organized force for political purposes”* (Gray,1999).

Peristiwa yang baru-baru ini menggemparkan dunia hubungan internasional yang mana terjadi kesepakatan antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat terkait perjanjian keamanan internasional yang dirangkum dalam Pakta AUKUS. Nama AUKUS sendiri diambil dari akronim tiga negara yang menginisiasi perjanjian tersebut, yaitu Australia, United Kingdom (Britania Raya), dan United States (Amerika Serikat). Pakta tersebut meliputi kerja sama teknologi kecerdasan buatan, siber, kuantum, sistem bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh yang akan berlangsung 18 bulan ke depan. Tujuan dibuatnya kesepakatan ini untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok yang dinilai semakin meluas dan berpotensi membahayakan wilayah Indo-Pasifik.

Sekilas memang tidak terlihat adanya kejanggalan dalam kesepakatan tersebut. Namun bila kita perhatikan lebih jeli isi kesepakatan tersebut, terlihat bahwa adanya potensi Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi dari Britania Raya dan Amerika Serikat. Proyek kapal selam ini bertujuan untuk melanjutkan pembangunan kapal selam kelas Collins dari *Project Sea 1000*. Proyek yang sebelumnya tertunda karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nuklir, kini kembali berjalan setelah dibantu oleh Amerika Serikat sebagai pemasok bahan bakar nuklir dengan bantuan desain yang dibuat oleh Britania Raya. Walaupun begitu, Menurut kesepakatan Internasional, hanya negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa saja yang diberi izin untuk mengembangkan serta melakukan pengayaan uranium untuk senjata nuklir, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Tetapi Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dengan tegas menepis tuduhan bahwa mereka akan melakukan pengayaan uranium sendiri melainkan mengambil dari Amerika Serikat yang akan memasok uranium yang telah melalui proses pengayaan.

Pakta AUKUS ini pun memicu beragam respon dari berbagai pihak baik perwakilan masing-masing negara hingga pengamat hubungan internasional. Kegaduhan pun mulai terjadi di kawasan Indo-Pasifik karena dikhawatirkan wilayah tersebut akan mengalami security dilemma dari segi kekuatan militer. Tiongkok pun tidak tinggal diam dan mengkritisi pemberlakuan pakta AUKUS dapat mengganggu stabilitas regional. Uni Eropa turut menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kesepakatan tersebut karena diperkirakan akan berdampak pada perekonomian wilayah mereka, khususnya untuk negara Prancis.

## **KERANGKA ANALITIK**

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Perspektif Neorealisme atau Realisme Struktural sebagai pisau analisis utama. Teori ini menjelaskan mengenai negara terdiri atas struktur sistemis yang masih memungkinkan kerja sama yang

didasari kepentingan nasional (keuntungan relatif, *zero sum game*), begitu pula negara yang harus dipandang dari segala aspek strukturalnya (bukan hanya kekuasaan dan politik saja). Pada anggapan teori ini sistem internasional bersifat anarki, dalam hal ini negara dituntut dapat survive dengan keadaan (sebagai suatu kepentingan nasional). Sistem internasional yang anarki menyebabkan tidak adanya suatu otoritas yang mengikat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga setiap negara didorong untuk mengedepankan prinsip *self-help*. Neorealisme sebenarnya tidak percaya bahwa negara dapat bekerjasama satu sama lain dengan tulus. Jika mereka melakukannya, mereka sebenarnya tidak melakukannya dengan sepenuh hati, karena mereka lebih fokus pada seberapa besar akan mendapatkan manfaat dari pihak lain (Waltz 1979).

Pemahaman dalam pendekatan neo-realisme menjadikan aktor dalam hubungan internasional merupakan sistem itu sendiri, dalam hal ini negara merupakan aktor yang dominan dalam hubungan internasional. Neorealis menjadikan isu keamanan menjadi fokus utama dalam sudut pandang mereka, yang mana hal ini merupakan warisan dari pandangan realisme yang menunjukkan bahwa sistem internasional masih berada pada keadaan yang anarki. Pada akhirnya pemahaman tersebut akan menghasilkan kondisi dilema keamanan yang menuntut negara-negara di dunia untuk meningkatkan kapabilitas kekuatannya masing-masing, hal ini digunakan untuk meningkatkan stabilitas pertahanan dan kekuasaan di dunia untuk mempertahankan perdamaian.

Neorealisme menjadi sangat cocok mengingat peneliti membahas mengenai proses pencapaian kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina dalam aspek pertahanan dan keamanan, dalam hal ini Filipina ingin mencapai pertahanan dan keamanan yang memumpuni melalui pengembangan kapabilitas militer yang mereka miliki. Keadaan ancaman yang kian meningkat menyebabkan negara-negara di dunia pada akhirnya memilih untuk bekerja sama untuk memaksimalkan kekuatan yang mereka pilih, hal ini dijadikan pilihan dibandingkan mereka harus meningkatkan kekuatan secara mandiri namun hasil yang didapatkan sedikit atau bahkan nihil. Pada akhirnya pengembangan sektor pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengimbangi kekuatan di dunia internasional dan meningkatkan keamanan nasional suatu negara dari ancaman-ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal, terkhusus Filipina yang merasa sangat terancam dari adanya dominasi China di wilayah Laut China Selatan.

Seluruh pembahasan peneliti terkait permasalahan terkait sejalan dengan penjelasan anarki yang menyebutkan tidak ada suatu otoritas pusat yang dapat memaksakan kehendak terhadap suatu negara, dalam hal ini aktor-aktor di dalam dunia internasional berusaha untuk mencapai keuntungan relatif melalui hubungan kerja sama dengan negara lain. Namun, tentu saja hubungan yang dilaksanakan didasari oleh kepentingan nasional tertentu yang dimiliki

oleh negara terkait untuk memaksimalkan kekuatan mereka, terkhusus dalam upaya peningkatan kapabilitas militer melalui hubungan kerja sama antar dua negara atau lebih.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi serta aktivitas (Moleong 2006). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell 2010).

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada (Mardalis 1995).

## **PEMBAHASAN**

Pada 15 September 2021, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan AUKUS, kesepakatan trilateral yang bertujuan untuk mengintensifkan kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik seolah-olah untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok. Sementara AUKUS memperkirakan kerja sama di sejumlah bidang kebijakan, elemen intinya adalah penyediaan kapal selam bertenaga nuklir buatan AS ke Australia. Ini telah memberikan dimensi baru bagi AUKUS, karena Australia tiba-tiba membatalkan kontrak yang sudah ada sebelumnya untuk pembelian tiga belas kapal selam bertenaga listrik diesel dari Prancis, yang mengarah pada kekacauan diplomatik.

Pemerintah Prancis, yang tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan tentang AUKUS, mencela Amerika Serikat dan Australia, menggambarkan kesepakatan itu sebagai "pengkhianatan" dan "tusukan di belakang". Terlepas dari kenyataan bahwa pertengkaran itu hanya menyangkut Prancis, Paris dengan cepat membingkainya dalam istilah Eropa yang lebih luas. Para pejabat Prancis berpendapat bahwa insiden itu sekali lagi menunjukkan perlunya UE untuk memperoleh otonomi strategis yang lebih besar dan mengembangkan kemampuan militer yang lebih maju. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Emmanuel

Macron, UE harus berhenti bersikap naif tentang kepentingan AS, yang telah secara tegas bergeser ke arah Asia (Parker et al 2021).

## **A. Reaksi Eropa Terhadap AUKUS**

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah menanggapi AUKUS secara berbeda. Sementara beberapa menunjukkan solidaritas terhadap Prancis, yang lain kritis terhadap reaksi marahnya, dengan alasan bahwa Paris memproyeksikan preferensinya sendiri ke arena UE. Pada umumnya, lembaga-lembaga UE berdiri di samping Prancis, mengeluh bahwa kerahasiaan seputar negosiasi AUKUS adalah demonstrasi yang tidak dapat diterima dari "kurangnya kesetiaan" (Perot 2021). Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, cara Amerika Serikat menangani proses AUKUS harus dilihat sebagai peringatan terhadap ketergantungan berlebihan UE pada negara-negara lain, termasuk sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Von der Leyen kemudian mengajukan permohonan publik untuk Uni Pertahanan Eropa dalam pidato tahunannya di State of the Union kepada Parlemen Eropa (Leyen 2021).

Di antara negara-negara anggota yang secara terbuka mendukung Prancis adalah Portugal, yang menggarisbawahi pentingnya otonomi militer UE. Menteri Luar Negeri Augusto Santos Silva mendefinisikan perilaku Australia sebagai hal yang patut dipertanyakan dan sebagai pelanggaran komitmen. Menteri Pertahanan João Gomes Cravinho mengeluh tentang kurangnya dialog di antara negara-negara anggota UE, karena tidak semua berbagi tujuan untuk menjadikan UE pemain global yang lebih otonom (Lusa 2021). Yunani menandatangani kesepakatan kapal perang dengan Prancis lebih dari satu minggu setelah pengumuman AUKUS. Kesepakatan Prancis-Yunani, yang dapat diterjemahkan ke dalam strategi untuk berpatroli di Mediterania Timur, ditafsirkan secara diskursif sesuai dengan penekanan Prancis pada otonomi strategis UE, dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotákis menggambarkannya sebagai "cara untuk Eropa yang otonom dan kuat".

Jerman telah menjadi pendukung suam-suam kuku otonomi strategis Uni Eropa di bawah Kanselir Angela Merkel, yang telah menerima gagasan itu hanya sejauh berada di bawah NATO. Kanselir berikutnya, Olaf Scholz yang sosial-demokrat, bisa dibilang memiliki pendapat yang sama, meskipun kaum Hijau pro-Ue yang gigih dalam koalisinya yang berkuasa mungkin ingin mendorong sedikit lebih keras untuk mengembangkan kapasitas kebijakan luar negeri dan keamanan Ue yang lebih besar. Beberapa politisi Jerman berpendapat bahwa Jerman dapat menengahi antara Amerika Serikat dan Prancis dan akibatnya antara yang terakhir dan negara-negara anggota UE yang paling Atlantik (Noyan 2021). Namun, beberapa pejabat Jerman tetap bersimpati terhadap "teman-teman Prancis

mereka" dan telah menyatakan kekecewaannya mengenai negara-negara penandatangan AUKUS (Perot 2021). Namun, pemerintah Jerman tetap diam. Begitu juga Italia, meskipun sering menggemakan posisi Prancis mengenai ambisi militer Eropa. Ini mungkin cerminan dari orientasi Atlantik Perdana Menteri Mario Draghi, atau lebih sederhana bahwa Italia tidak ingin diseret ke dalam konfrontasi bilateral dengan Amerika Serikat tentang masalah yang tidak secara langsung mempengaruhi kepentingannya.

Negara-negara Uni Eropa lainnya memang memiliki reaksi beragam, dengan Polandia sebagai contoh kasus. Di Warsawa, AUKUS sebagian besar telah dianggap sebagai pertunjukan pengabaian relatif terhadap kepentingan sekutu Eropa oleh Pemerintahan Atlantik Joe Biden yang secara retorik teguh. Namun, Polandia secara bersamaan menafsirkan pakta keamanan itu sebagai hal yang positif, karena merupakan tanda bahwa Amerika Serikat berdedikasi untuk mengimbangi China dan melawan otokrasi (termasuk Rusia) (Erlanger 2021). Beberapa negara anggota sama sekali tidak kritis terhadap AUKUS. Denmark menjauh dari posisi UE, mengingat "kesetiaan Presiden Biden kepada Eropa", sambil mengkritik reaksi Prancis. Selain itu, Belanda dan Swedia tidak menyatakan ketidakpuasan terhadap AUKUS, karena mereka berfokus pada manfaat yang mungkin dibawa oleh kesepakatan perdagangan UE-Australia yang baru bagi ekonomi domestik mereka.

## **B. Implikasi Untuk Otonomi Uni Eropa**

Apa yang diperlukan untuk otonomi strategis Eropa? Untuk menganalisis implikasi AUKUS, kita harus melihat konsekuensi geopolitiknya yang lebih luas bagi NATO, serta pendekatan UE terhadap Indo-Pasifik. Pertama, salah satu alasan utama mengapa AUKUS telah menyebabkan krisis diplomatik adalah frustrasi di Paris yang dihasilkan oleh fakta bahwa Prancis, terlepas dari kehadiran militernya di Pasifik (di mana hingga dua juta warga negara Prancis tinggal), dan dengan ekstensi UE sendiri tidak dilihat sebagai aktor terkemuka di wilayah tersebut. Hal ini dengan fasih dibuktikan oleh waktu pengumuman AUKUS, yang bertepatan dengan hari UE merilis strateginya untuk Indo-Pasifik.

Kedua, dengan menetapkan pakta militer, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terlibat dengan pendekatan keras terhadap kehadiran Tiongkok di Indo-Pasifik. Strategi ini bertolak belakang dengan pendekatan UE yang lebih lembut yang didorong oleh ekonomi, meskipun Prancis telah mendorong untuk mengeraskannya. UE, dan terlebih lagi negara-negara anggotanya, akan merasa semakin sulit untuk mencapai keseimbangan antara keinginan mereka untuk mengintensifkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok – seperti yang mereka coba lakukan dengan menyetujui Perjanjian Komprehensif UE-Tiongkok tentang Investasi yang sekarang terhenti – dan minat mereka untuk tetap dekat dengan sekutu

terpenting mereka, Amerika Serikat, yang mendorong pendekatan yang jauh lebih keras. Lebih sering daripada tidak, UE harus membuat pilihan karena tidak dapat memiliki dua arah.

Ketiga, kita harus menekankan bagaimana konflik AUKUS mempengaruhi hubungan dengan NATO. Banyak negara anggota UE berpendapat bahwa UE yang otonom akan merusak NATO, sambil mengasingkan Amerika Serikat. Krisis kemudian menghidupkan kembali perdebatan kunci: haruskah UE meningkatkan permainan militernya dan menjadi lebih otonom dari aliansi transatlantik, atau sebaliknya melanjutkan pendekatannya yang seimbang, sementara Washington membawa senjata itu?

Jadi, apa arti AUKUS bagi otonomi strategis Eropa? Sederhananya, ini menandakan UE bahwa mungkin sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan militernya. Blok itu dapat mempertahankan pendekatan yang seimbang di mana hubungan ekonomi dengan Tiongkok diperkuat; atau sebaliknya mengikuti strategi militer yang lebih keras, oleh karena itu berkontribusi pada pembatasan Pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Namun, jika memang berniat untuk menjadi pemain global strategis yang otonom, mungkin AUKUS mewakili wake-up call yang hilang dari UE.

### **C. Gejolak Yang Terjadi Pada Uni Eropa**

Uni Eropa merupakan organisasi antarpemerintahan yang beranggotakan beberapa negara di regional Eropa. Uni Eropa terkenal sebagai organisasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Uni Eropa menekankan prinsip multilateralisme dalam pelaksanaan hubungan internasional. Namun dari beragam kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa baik dengan negara maupun sesama aktor internasional, hubungan antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat menjadi topik yang paling menarik untuk dibahas. Sering terjadinya perbedaan prinsip serta persepsi antara kedua pihak ini, mengindikasikan hubungan yang tidak begitu akurat. Apalagi ketika kedua pihak ini bertindak sebagai penengah isu yang berkembang di dunia, terkadang justru memperumit masalah yang sudah ada karena perbedaan pendapat dalam cara penyelesaian suatu kasus.

Baru-baru ini hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa terlihat semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut diawali dengan ketidaksetujuan Uni Eropa dalam tindakan yang diambil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam menangani isu di Afghanistan. Hubungan kedua pihak ini semakin diperkeruh dengan aliansi baru yang bernama AUKUS yang dibuat dengan dua sekutu lainnya, Britania Raya dan Australia. Menanggapi aliansi tersebut, Uni Eropa mengumumkan strategi di kawasan Indo-Pasifik sehari setelah pembentukan Aliansi AUKUS diumumkan, yang secara efektif menekan jalur independennya di kawasan tersebut. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memperingatkan Eropa tentang kepercayaan kepada Amerika Serikat dan percaya bahwa Eropa dapat

memainkan peran strategis dalam menstabilkan kekuatan regional setelah pembentukan Aliansi AUKUS di wilayah Indo-Pasifik.

Trust issue yang dimiliki Prancis terhadap Amerika Serikat bukan saja disebabkan oleh pembentukan Aliansi AUKUS. Sebelumnya Prancis telah kehilangan kesepakatan yang dinilai setara dengan US\$65 miliar atau setara dengan Rp. 925 triliun dengan Australia dalam penyediaan kapal selam konvensional betenaga diesel. Pembatalan kesepakatan tersebut berdampak pada sektor ekonomi dan pertahanan Prancis. Sebelumnya Australia berencana membeli 12 kapal selam dari Naval Group, pembuat kapal Prancis, secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis, JeanYves Le Drian menyebut keputusan Amerika untuk mengecualikan sekutu Eropa dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah Indo-Pasifik disebut mengurangi penghormatan terhadap

Perbedaan pendapat antara Aliansi Aukus dan Uni Eropa dalam pendekatan terhadap Tiongkok dan negara-negara di wilayah Indo-Pasifik, membuat terjadinya tabrakan kepentingan. Amerika yang memandang Tiongkok sebagai ancaman keamanan wilayah Indo-Pasifik, sedangkan Uni Eropa tengah gencar menyerukan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Namun Aliansi multilateralisme yang telah berjalan selama bertahun-tahun AUKUS benar-benar tidak memberi kesempatan bagi Uni Eropa untuk menangani masalah tersebut dan langsung mendeklarasikan fokus keamanan di wilayah Indo-Pasifik tanpa sekalipun berdiskusi dengan pihak Uni Eropa.

#### **D. Tanggapan Tiongkok terhadap Aliansi AUKUS**

Tiongkok merupakan negara yang terletak di Asia Timur yang dianggap dapat menyaingi Amerika Serikat terutama dalam sektor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran angka ekspor barang serta penyebaran teknologi yang meluas di seluruh dunia. Selain sektor ekonomi, kini Tiongkok berupaya untuk membangun kekuatannya di bidang keamanan tepatnya militer. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok tengah melakukan modernisasi militer dengan mengadopsi pendekatan unilateral. Hal tersebut ditujukan untuk kepentingan keamanan nasional negara serta mengembangkan daya jangkauan angkatan perangnya terkait konflik dengan Taiwan. Hampir tiap tahunnya, Tiongkok menaikkan persentase anggaran militer di atas 10 persen. Terjadinya peningkatan anggaran pertahanan tiap tahunnya, menjadi bukti keseriusan Tiongkok dalam usaha memperkuat kekuatan militer negara. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2020, Tiongkok memiliki sekitar 350 kapal termasuk 130 kombatan permukaan. Tiongkok juga disinyalir mempunyai 50 kapal perusak, 72 korvet, 132 kapal patroli, serta 36 kapal penyapu

ranjau. Tiongkok memiliki 79-unit kapal selam yang mana 12 diantaranya termasuk kapal selam bertenaga nuklir.

Peningkatan kekuatan militer Tiongkok tersebut menimbulkan ragam persepsi dari beberapa negara terkait kebenaran tujuan mereka. Baik negara-negara tetangga hingga negara yang berbeda regional sekalipun turut merasa ketakutan dengan tindakan Tiongkok. Salah satu negara yang merasa paling cemas terhadap tindakan Tiongkok tersebut adalah Amerika Serikat. Security Dilemma yang dirasakan Amerika Serikat merupakan alasan dan latar belakang terciptanya Aliansi AUKUS. Aliansi AUKUS hadir sebagai bentuk pencegahan Amerika Serikat dalam mencegah berkembangnya kekuatan militer Tiongkok yang dianggap dapat membahayakan wilayah Indo-Pasifik.

Tiongkok tidak tinggal diam menanggapi pembentukan Aliansi yang melibatkan tiga negara ini. Menteri Luar Negeri China, Zhao Lijian, menganggap aliansi yang melibatkan pengembangan nuklir merupakan tindakan yang tak bertanggung jawab dan berpotensi melanggar perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Senada dengan pendapat Zhao Lijian, juru bicara kedutaan Tiongkok di Amerika Serikat, Liu Pengyu, berpendapat bahwa aliansi tersebut hanya sekedar trauma mentalitas Perang Dingin yang belum terobati serta prasangka belaka. Tiongkok justru menganggap kehadiran Aliansi AUKUS adalah musuh sebenarnya yang dapat membahayakan keamanan wilayah Indo-Pasifik. Dengan hadirnya Pakta AUKUS yang memperbolehkan Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir, akan menimbulkan security dilemma di wilayah tersebut dan berpotensi menginisiasi arms race.

Sebagai tindak lanjut dari adanya Aliansi AUKUS, Tiongkok berencana akan bertindak lebih agresif untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah Laut Natuna Utara. Tiongkok sama sekali tidak gentar terhadap Aliansi AUKUS dan hanya menganggap aliansi tersebut hanyalah gertakan belaka sebagai provokasi untuk memancing Tiongkok agar melakukan tindakan ceroboh agar Amerika Serikat dapat melancarkan serangan balasan. Tiongkok juga berharap agar ASEAN ikut menolak Pakta AUKUS dalam rangka mematuhi perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan mencegah bahaya yang dapat timbul sebagai ancaman keamanan regional di wilayah Indo-Pasifik.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan anggaran militer Tiongkok tiap tahunnya, membuat Amerika Serikat mewaspadaai pergerakan Tiongkok yang berpotensi membahayakan wilayah Indo-Pasifik ke depannya. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat merespon tindakan Tiongkok dengan membuat aliansi yang didasari oleh pakta yang bernama sama yaitu AUKUS. Respon Amerika Serikat tidak lain karena ketakutan dan adanya security dilemma semata. Namun justru menurut beberapa negara di ASEAN, tindakan Amerika Serikat membentuk Aliansi

AUKUS di wilayah mereka yang lebih berpotensi membahayakan keamanan regional serta ditakutkan dapat menimbulkan arms race di kawasan Asia-Pasifik.

Pembentukan Aliansi AUKUS yang merupakan perjanjian trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat turut mengganggu kestabilan serta hubungan negara-negara tersebut dengan Uni Eropa. Sebut saja Prancis yang merasa dikhianati oleh keberadaan aliansi tersebut. Akibat adanya Aliansi AUKUS, kesepakatan yang hampir terjalin antara Australia dengan Prancis mengenai pembelian kapal selam konvensional bertenaga diesel kandas begitu saja. Padahal kesepakatan tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian serta keberlangsungan pertahanan Prancis. Sebagai negara tetangga antara Prancis dan Britania Raya, Prancis turut mengecam Britania Raya karena tidak adanya dialog kepada Uni Eropa untuk turut ambil peran dalam Aliansi AUKUS dan dianggap ikut menghasut Australia untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Akibatnya hubungan antara Uni Eropa dengan ketiga negara tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

Tiongkok turut buka suara terhadap adanya Pakta AUKUS yang dinilai membahayakan keamanan regional Asia-Pasifik karena memperbolehkan Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Asia-Pasifik yang terkenal sebagai wilayah perekonomian dan jalur perdagangan dapat terganggu akibat kehadiran Aliansi AUKUS. Perubahan fokus sektor ekonomi menjadi kepentingan keamanan ditakutkan dapat mengganggu kestabilan negara-negara yang terlibat. Belum lagi adanya ancaman arms race yang kapan saja dapat merubah wilayah Asia-Pasifik menjadi medan perang.

Tindakan yang diambil Amerika Serikat terkesan gegabah serta tanpa perhitungan. Tidak adanya dialog terlebih dahulu dengan Tiongkok mengenai maksud dan tujuan yang jelas membuat kesalahpahaman yang terus mengakar. Tanpa adanya diskusi dengan pihak Uni Eropa berakibat pada memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Apalagi dengan keberadaan Pakta AUKUS menjadi faktor utama kegagalan kesepakatan antara Australia dan Prancis mengenai pembelian kapal selam konvensional bertenaga diesel. Pihak ASEAN yang tidak mendapat informasi sebelumnya terkait pembentukan Aliansi AUKUS, justru mengalami security dilemma dan takut wilayahnya akan menjadi medan perang dimana adanya potensi arms race akan terjadi.

Dapat dilihat dari fenomena ini bahwa Amerika Serikat masih belum bisa terlepas dari trauma mereka terhadap mentalitas Perang Dingin. Tidak adanya dialog terlebih dulu dan langsung mengambil tindakan bersifat keamanan yang berdasar dari ketakutan dan security dilemma belaka. Seakan tidak pernah belajar dari pengalaman tersebut, tidak aneh bila sejarah kelam dahulu dapat terulang lagi. Seharusnya Amerika Serikat dapat membentuk sikap dan tindakan dengan kepala dingin sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan dunia serta sistem internasional. Bila ditelisik lebih dalam kemungkinan adanya kepentingan pribadi Amerika Serikat dalam mencegah peningkatan kekuatan militer

Tiongkok, mungkin berangkat dari persaingan kedua negara ini baik dari sektor ekonomi maupun teknologi. Sikap ketidakdewasaan Amerika Serikat dapat menuntun pada keputusan dan kebijakan yang dapat membahayakan negaranya sendiri secara khusus bahkan seluruh dunia secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Creswell, John W, “Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran”,2010. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm : 1-5

Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (California: Addison-Wesley Publishing Company. 1979)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 26

Moleong, J Lexy .2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung.

### Artikel, Jurnal, Penelitian Ilmiah

Elie Perot, “The AUKUS Agreement, What Repercussions for the European Union?”, in *European Issues*, No. 608 (28 September 2021), <https://www.robertschuman.eu/en/european-issues/0608-the-aukus-agreement-what-repercussions-for-the-european-union>.

George Parker et al. “AUKUS: How Transatlantic Allies Turned on Each Other over China’s Indo Pacific Strategy”, in *Financial Times*, 24 September 2021, <https://www.ft.com/content/06f95e54-732e-4508-bc92-c3752904ba67>

Gray, C. S. (1977). *Across the Nuclear Divide-Strategic Studies, Past and Present. International Security*, 24-46.

Oliver Noyan, “Germany Declines to Back France in Submarine Row”, in *EURACTIV*, 23 September 2021, <https://www.euractiv.com/?p=1649898>.

Steven Erlanger, “The Sharp U.S. Pivot to Asia is Throwing Europe off Balance”, in *The New York Times*, 28 September 2021, <https://www.nytimes.com/2021/09/17/world/europe/biden-chinaeurope-submarine-deal.htm>

Ursula von der Leyen, 2021 State of the Union Address, 15 September 2021, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH\\_21\\_4701](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701).